

# STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN (STUDI KASUS DI NANUSA, NATUNA DAN NUNUKAN)

## *MARINE AND FISHERIES BASED-STRATEGIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE BORDER REGION (A CASE STUDY IN NANUSA, NATUNA AND NUNUKAN)*

### **Mira**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI  
Jl. Petamburan VI, Jakarta Pusat  
E-mail: miraclenia@yahoo.com

### **Akhmad Solihin**

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor  
Jl. Rasamala, Gedung FPIK, Bogor  
E-mail: achmad\_solihin@yahoo.com

### **Tajerin**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI  
Jl. Petamburan VI, Jakarta Pusat  
E-mail: tajerin@gmail.com

Diterima: 15 Juni 2013, Direvisi: 15 Agustus 2013, Disetujui: 30 Agustus 2013

### **Abstract**

*The purpose of this study are to identify problems and strategies for economic development in the border region. The study was conducted in 2012 in Natuna, Nunukan, and Nanusa. This study uses qualitative data collected through Focus Group discussion. This study also uses analysis techniques of LFA (Logical Framework Analysis), SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threa) and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Based on the LFA analysis concluded 7 major problems in the border region are (1) The low productivity of captured fisheries and aquaculture, (2) the weak role of economic institutions, (3) the difficulty of the fuel supply, (4) the high illegal fishing practices, (5) economic dependence on foreign countries, (6) lack of support for production inputs, (7) the low frequency of sea transport. Based on the SWOT analysis and QSPM, the formulation of strategies for economic development in the border region are, first, Government should build 1 SPDN and 1 BBI at each study site. Second: Government should provide funding Rp 77 million to Rp 200 million for captured fisheries and Rp 60 million for aquaculture. Third: The government must provide a minimum of 25 extension workers to strengthening the capacity of fishermen. Fourth: The government must realize the 180 day monitoring/year.*

**Keywords:** *Economic improvement, border areas, strategies, fihermen.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu, permasalahan dan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan berbasis sektor kelautan dan perikanan telah dilakukan di Natuna, Nunukan, dan Nanusa pada tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat kualitatif yang dikumpulkan dengan *Focus Group Disscussion* (FGD). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik LFA (*Logical Framework Analisys*) untuk memetakan permasalahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, teknik SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) untuk merumuskan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan, dan teknik QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*) untuk menentukan pilihan strategi prioritas. Berdasarkan total nilai dari *causatif* dan *effect* dari analisis LFA disimpulkan 7 permasalahan utama dari 19 isu permasalahan dalam peningkatan ekonomi wilayah perbatasan, yaitu: (1) produktivitas

perikanan tangkap dan budidaya yang rendah; (2) lemahnya peran kelembagaan ekonomi; (3) pasokan BBM tidak lancar dan mahal harganya; (4) maraknya *illegal fishing*; (5) ketergantungan perekonomian terhadap negara luar; (6) dukungan penyediaan input produksi berupa benih dan pakan yang kurang dan (7) kurangnya frekuensi angkutan laut. Berdasarkan analisis SWOT dan QSPM, dirumuskan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan yaitu, *pertama*: Untuk mendukung peningkatan produktifitas perikanan tangkap dan budidaya pemerintah setidaknya membangun 1 SPDN dan 1 BBI di masing-masing wilayah tersebut. *Kedua*: Pemberian bantuan modal untuk peningkatan usaha penangkapan minimal Rp 77 juta sampai dengan Rp 200 juta dan Rp 60 juta untuk usaha budidaya. *Ketiga*: Pemerintah minimal menyediakan 25 tenaga pendamping untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan kualitas nelayan, pembudidaya, dan pengolahan perikanan. *Keempat*: Pemerintah harus merealisasikan 180 hari pengawasan dimana selama ini jumlah hari pengawas baru terealisasi 100 hari per tahun.

**Kata kunci:** Peningkatan ekonomi, wilayah perbatasan, strategi, nelayan .

## PENDAHULUAN

Dalam menerapkan pembangunan di sebuah pembangunan sebuah kepulauan menurut Christophe (2001), terdapat beberapa kesulitan dalam hal udara dan juga laut dan ini dikarenakan antara lain tingginya biaya, keterlambatan dan faktor ketidaknyamanan dalam hal cuaca maupun kondisi alam. Permasalahan pertama yaitu aksesibilitas yang rendah itu karena jauhnya pulau-pulau terluar dari pulau utama (*mainland*), hal ini mengakibatkan frekuensi kapal sangat jarang. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dalam hal proses pemasaran komoditas perikanan untuk dijual ke negara tetangga dan atau ke daerah-daerah lain dalam satu negara.

Kedua, permasalahan semua aktivitas sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, terutama untuk kegiatan perekonomian. Sehingga ketika terjadi cuaca buruk masyarakat tidak bisa menjual komoditasnya ke negara tetangga atau mereka tidak bisa melakukan penangkapan ikan karena menggunakan kapal yang berteknologi rendah sehingga tidak bisa melaut ketika terjadi ombak besar. Rata-rata ukuran kapal yang dimiliki masyarakat adalah kurang dari 7 GT, ukuran kapal yang kecil ini tidak dapat meminimalisir faktor cuaca yang sangat mempengaruhi aktivitas nelayan. Saat

ini dengan perahu nelayan yang ukuran hanya kurang dari 7 GT maka wilayah penangkapan hanya sejauh 3 mil. Permasalahan perbatasan umumnya disebabkan oleh jauhnya wilayah perbatasan dari *mainland*.

Permasalahan ketiga menyangkut perekonomian wilayah perbatasan yang sangat dipengaruhi oleh negara tetangga. Kondisi perekonomian kawasan perbatasan jika dibandingkan dengan wilayah negara lain yang berbatasan dengan wilayah Indonesia atau dengan wilayah lain di Indonesia sangat tertinggal. Bahkan menurut Wismayanti (2012), kehidupan di wilayah perbatasan sering lebih susah yang memicu perdagangan anak perempuan. Belajar dari kasus Sipadan dan Ligitan, penanganan yang tidak serius pada wilayah perbatasan mengakibatkan lepasnya pulau-pulau tersebut dari kepemilikan pemerintah Indonesia.

Selain karena faktor keadaan alam dan geografis yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga disebabkan oleh faktor sumberdaya manusia (internal). Menurut Sutaat (2012), faktor internal tersebut bersumber dari perorangan, kelompok, atau masyarakat sendiri, seperti tingkat pendidikan yang rendah, tidak punya keterampilan, pemilikan terhadap aset produksi yang kurang

dan lemahnya modal sosial. Tulisan Sutaat (2012) terlalu berfokus pada sumberdaya di darat, padahal ada juga wilayah perbatasan yang sebagian besar masyarakat wilayah perbatasan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya di laut.

### **Karakteristik Wilayah Perbatasan**

Pulau-pulau terluar memiliki tingkat insularitas yang tinggi karena sebagian besar jauh dari daratan induknya. Persoalan ekonomi pulau-pulau kecil yang terkait dengan karakteristik insularitas ini terutama yang terkait dengan persoalan transportasi dan komunikasi, lingkungan ekonomi yang cenderung monopolistik, melimpahnya sumberdaya kelautan dan dominasi sektor jasa. Pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau terluar dicirikan antara lain oleh aksesibilitas yang rendah, aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh cuaca, dan kegiatan perekonomian wilayah sangat dipengaruhi oleh negara tetangga. Adrianto (2008) juga mengungkapkan bahwa karakteristik penting lain dari pulau-pulau kecil yang terkait dengan pengembangan ekonomi wilayah adalah tingkat insularitas.

Dalam beberapa hal, *specialized economy* seperti yang terjadi untuk pulau-pulau kecil berefek positif, khususnya yang terkait dengan konsep skala ekonomi. Dengan keanekaragaman spesialisasi ekonomi dari sebuah pulau kecil, maka semakin meningkat pula tingkat ketahanan ekonomi dari pulau tersebut dari faktor eksternal sepanjang pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut memperhitungkan tingkat daya dukung pulau secara umum (Hein, 1990).

Pada wilayah perbatasan interaksi antar penduduk di dua negara berbatasan cukup intensif ketimbang wilayah *mainland* dalam satu negara. Kegiatan perekonomian dengan intensitas cukup tinggi dari negara tetangga terhadap penduduk pulau terluar Indonesia.

Penduduk di wilayah perbatasan cenderung menjual produk hasil usaha mereka ke negara tetangga, begitu pun sebaliknya lebih memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari di negara tetangga tersebut. Hal ini karena aksesibilitas yang relatif mudah ke negara tetangga daripada ke pulau utama (*mainland*) yang terdekat di wilayah Indonesia. Apalagi dengan adanya fasilitas '*kartu pass*', memungkinkan warga Indonesia di wilayah perbatasan dapat dengan mudah keluar masuk ke negara tetangga.

Adanya pengaruh negara tetangga baik dari sektor ekonomi, pendidikan, atau budaya pada wilayah perbatasan. Jika tidak ditangani dengan serius maka hal ini sangat membahayakan integritas bangsa Indonesia (ancaman non-militer), oleh karena itu jika ingin mengembangkan kawasan perbatasan harus didesain secara cermat dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif terhadap karakteristik, permasalahan dan potensinya. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum (Dephan, 2008).

### **Kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar atau wilayah perbatasan, kelembagaan Negara yang paling berperan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan secara langsung bahwa, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Menurut Sutaat (2012), daerah perbatasan adalah suatu wilayah yang berada di perbatasan antar daerah dalam satu negara, atau daerah yang berada di perbatasan antar negara.

Semenjak kasus Sipadan dan Ligitan, pemerintah telah bertekad untuk mengubah image kawasan perbatasan dari halaman belakang (*backyard*) menjadi halaman depan (*front yard*) bangsa (Munaf, 2008). Perubahan orientasi dan arah kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan ini jelas bukan hal yang mudah dan dapat dituntaskan dalam waktu relatif singkat. Utomo (2005) menambahkan kebijakan memperbaharui wajah perbatasan ini tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai kebijakan pembangunan yang normal, namun harus diposisikan sebagai kebijakan khusus (*emergency policy*) dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan di segala bidang (*catch-up strategy*). *Emergency policy* tersebut meliputi pembentukan tim/kelembagaan khusus yang menangani ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan. Tentu saja pembentukan tim/kelembagaan khusus membutuhkan anggaran khusus dari pemerintah pusat, jangan hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah wilayah perbatasan.

Menurut (Hadi, 2013), pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu komitmen dan kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004-2025, salah satu arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia dilakukan melalui pengembangan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar yang selama ini luput dari perhatian. Hadi (2013), menambahkan untuk mencapai sasaran ini, kebijakan pembangunan jangka menengah diarahkan pada upaya untuk pengembangan kawasan perbatasan dengan mengubah arah

kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Artinya, harusnya pemerintah tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan saja sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 26 Tahun 2007, tetapi juga juga diperlukan pendekatan kesejahteraan.

Pendekatan peningkatan kesejahteraan itu penting untuk menghadapi ancaman non-militer seperti ancaman terhadap integritas bangsa di wilayah perbatasan, perlu dibangun sistem ekonomi yang kuat dan berdaya saing yang didukung oleh sistem distribusi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia (Prabowo, 2009). Implikasi lanjutannya bagaimana memperdayakan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil terluar melalui peningkatan kesejahteraan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) teridentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan ekonomi wilayah perbatasan khususnya daerah perbatasan yang berada di pulau-pulau kecil seperti di daerah timur Kalimantan dan di daerah barat utara Kalimantan serta Talud; (2) teridentifikasi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kelautan dan perikanan; (3) Terumuskannya prioritas strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kelautan dan perikanan.

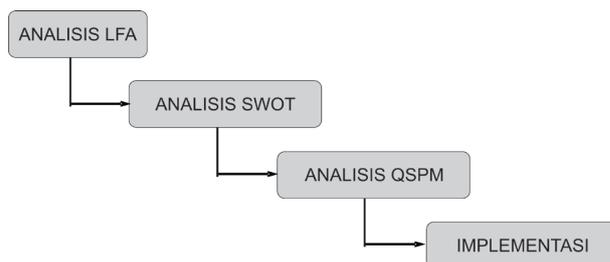
Data yang diambil berupa data primer yang diambil dengan melakukan klarifikasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal kepada nara sumber yang berkompeten dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Natuna, Nanusa, dan Nunukan Sebatik. Sedangkan data sekunder diambil dari BPS, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Bappeda. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui desk

studi pada penelitian yang sebelumnya. Data juga dikumpulkan dengan FGD (*focus group discussion*) untuk mengevaluasi permasalahan peningkatan kesejahteraan pada 3 wilayah perbatasan (Nunukan, Natuna, Nanusa). Pada FGD yang diundang adalah *stakeholder* dan peneliti yang pernah mengadakan penelitian di tiga lokasi penelitian. Menurut Onwuegbizie, A, et al (2009), FGD digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat kualitatif. Boateng, W, 2012, menambahkan bahwa FGD digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif pada kelompok-kelompok untuk melihat pendapat mereka terhadap suatu permasalahan. Ada aturan-aturan yang harus diikuti saat mengadakan FGD untuk mengkonfirmasi data-data kualitatif, seperti dominasi suatu individu. Aturan tersebut adalah tidak mendominasi diskusi Pada saat diskusi pada FGD yang dilakukan, sesuatu hal yang harus diwaspadai adalah mengurangi dominasi sesuatu individu dalam mengemukakan pendapatnya, seperti yang dikemukakan oleh Smithson, J (2000). Lokasi kegiatan adalah kecamatan perbatasan laut di Kabupaten Natuna (Kepri), Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulut), dan Kabupaten Nunukan (Kaltim). Penelitian dilakukan pada tahun 2012.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang menyebabkan rendahnya perekonomian wilayah perbatasan dirumuskan dengan analisis LFA (*logical framework analysis*), sedangkan perumusan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan dilakukan dengan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, and threat*), dan pada tahap akhir dilakukan analisis QSPM (*Matriks Quantitative Strategic Planning*) untuk menentukan strategi prioritas yang akan diaplikasikan untuk peningkatan ekonomi wilayah perbatasan.

Berdasarkan hasil modifikasi dari pendekatan LFA, SWOT, dan QSPM maka

analisis ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu (Gambar 1):



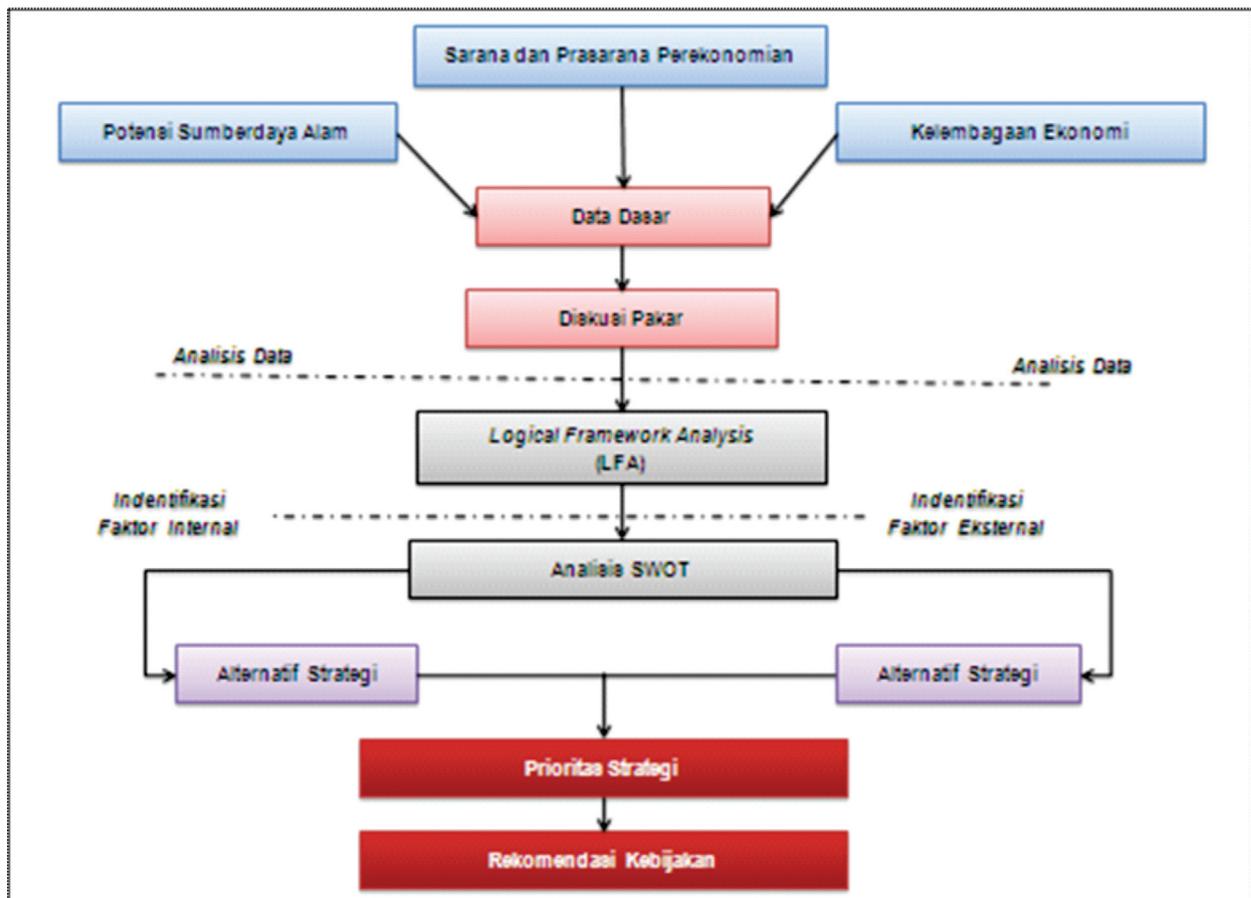
**Gambar 1. Tahapan Analisis**

Pada analisis tahap pertama ini akan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan rendahnya perekonomian di wilayah perbatasan, dimana analisis menggunakan faktor penyebab dan faktor akibat. Analisis LFA biasanya dilakukan sebagai pendekatan perencanaan dalam pembangunan (Roduner, D and Schalappi, W, 2008). Pada analisis LFA ini para peneliti melakukan identifikasi terhadap isu permasalahan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, kemudian akan dicari akar permasalahan dari isu permasalahan yang teridentifikasi, dan pada akhirnya mencari fungsi tujuan dari permasalahan yang ada. Data-data tersebut diperoleh dengan dengan kuesioner untuk menentukan prioritas permasalahan, jika ada yang sama maka diperjelas saat FGD. Analisis LFA merupakan sebuah metode untuk menganalisis hubungan sebab akibat pada sebuah permasalahan dalam pembangunan. Menurut Tong (2011), LFA digunakan untuk mencari permasalahan utama supaya strategi yang diputuskan optimal. Salah satu kelebihan dari analisis LFA ini adalah peneliti dari berbagai latar belakang dapat melakukan analisis secara bersama-sama. Dalam penelitian ini analisis LFA merupakan bagian dari proses perencanaan partisipatif untuk mencari akar permasalahan dari hubungan sebab akibat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada analisis tahap kedua ini akan dirumuskan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan dengan berbasiskan sektor kelautan dan perikanan dipilih berbagai strategi berdasarkan faktor permasalahan pada hasil analisis pertama. Menurut Valentin (2005), analisis SWOT merupakan untuk mencari assesment terhadap usaha pemberdayaan yang kurang efektif. Analisis SWOT dalam penelitian ini adalah suatu metode untuk mengambil keputusan dalam strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam analisis SWOT peneliti harus mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Artinya dalam analisis bagaimana caranya mengembangkan kekuatan yang dimiliki wilayah perbatasan, meminimalkan kelemahan yang dimiliki, kemudian menangkap peluang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan, dan menghilangkan ancaman dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ardini (2012), mengungkapkan bahwa dalam analisis SWOT ini data dibagi menjadi analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal. Faktor internal merupakan aspek dari dalam yang mempengaruhi suatu organisasi dalam pengambilan suatu keputusan. Faktor eksternal merupakan aspek diluar organisasi yang mampu memberi pengaruh nyata terhadap proses penyusunan suatu kebijakan. Rangkuti (2005), menambahkan langkah dalam pembuatan Matrik SWOT adalah pembuatan faktor

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian pembuatan matrik dengan membuat pembobotan yang dibedakan atas faktor penting dan faktor tidak penting.

Pada tahap ketiga akan dibuat prioritas strategi dan langkah implementasi untuk peningkatan ekonomi wilayah perbatasan berdasarkan strategi yang dirumuskan pada analisis SWOT. Analisis QSPM digunakan untuk membuat perangkat strategi dengan memperoleh daftar prioritas yang ada. Analisis QSPM merupakan rumusan strategi untuk mencari prioritas dalam pengambilan keputusan (David, et al, 2009). QSPM merupakan suatu alat yang membuat para perencana strategi dapat menilai secara objektif strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan kritis eksternal dan internal yang telah diketahui terlebih dahulu. Teknik QSPM akan menentukan strategi yang terpilih yang sangat sesuai dengan permasalahan (Nejad, et al, 2011). Daya tarik dari strategi terpilih dihitung dari bobot dan rangking yang diperoleh pada analisis *internal factor* dan analisis *external factor*; kedua strategi yang terpilih pada internal factor dan external factor dimunculkan kembali pada analisis SWOT. Meskipun dalam mengembangkan QSPM membutuhkan sejumlah keputusan subjektif, hal ini dapat membuat beberapa keputusan kecil sepanjang proses akan meningkatkan kemungkinan keputusan strategis akhir yang baik (David, 2003).



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran Kajian Strategi Peningkatan Ekonomi Wilayah Perbatasan Berbasis Perikanan dan Kelautan**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pertama, Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari Propinsi Kalimantan Timur (BPS, 2011). Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan (BPS, 2011), Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2010 berjumlah 140.841 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 9,87 jiwa/km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk tersebut pada satu sisi karena merupakan dampak desentralisasi yang sehingga menarik minat pendatang baru untuk tinggal di kabupaten ini untuk bekerja dan berinvestasi. Pada sisi lain, faktor pertumbuhan

pendudukan juga dipicu oleh dibukanya lapangan kerja di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan industri pengolahan kayu serta sektor jasa. Namun pertumbuhan penduduk tidak diikuti peningkatan kualitas pendidikan, dimana dominasi pendidikan penduduk adalah tidak tamat SD (51.439 orang), adapun yang pendidikannya di Atas SMU adalah para PNS dan pendatang yang biasanya berasal dari mainland. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu pembangunan jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi pula. Produksi perikanan menurut (BPS, 2011), tercatat 66.329,09 ton, yang terdiri atas 4.034,74 ton produksi perikanan penangkapan dan 62.294,75 ton perikanan budidaya. Pada tahun 2010 jumlah rumah

tangga perikanan penangkapan (RTP) tercatat 1.679 rumah tangga atau turun sebesar 2,38 persen dibandingkan tahun 2009. Penurunan RTP dipicu karena banyaknya masyarakat yang tertarik bekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kayu.

Kedua, Kabupaten Natuna terletak antara 105°00' sampai dengan 110°00' Bujur Timur dan 1°16'00" sampai dengan 7°19'00" Lintang Utara. Negara lain yang berbatasan dengan Natuna adalah Vietnam dan Kamboja (sebelah utara), dan dengan Malaysia (sebelah timur). Jika dibandingkan dengan Nunukan, kepadatan penduduk Natuna lebih tinggi, karena menurut (BPS, 2011), Penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2010 berjumlah 140.841 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 34,48 jiwa/km<sup>2</sup>. Namun jumlah penduduk yang padat tidak diimbangi penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan tingginya tingkat pengangguran. Setiap tahunnya ada 154 orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Sektor yang menyerap lapangan kerja terbanyak masih di sektor primer seperti sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Ada juga sektor yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu sektor jasa dan perhotelan, dan sektor pertambangan, tapi sektor-sektor tersebut banyak tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Natuna. Tidak banyak penduduk lokal yang bekerja di sektor pertambangan, dan jasa, karena tingkat pendidikannya yang rendah. Industri yang bergerak di sektor pertambangan ini tentunya mempunyai kebutuhan untuk menerapkan *program community development*. Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengembangkan dan membangun masyarakat lokal di sekitar daerah industri pertambangan. Rata-rata pencari kerja di Kabupaten Natuna hanya tamatan SMU (56 orang). Produksi perikanan tangkap masih

mendominasi sektor perikanan, meskipun di wilayah ini sudah berkembang usaha perikanan budidaya. Berdasarkan (BPS, 2011), produksi perikanan tangkap mencapai 42.119,38 ton, sedangkan sektor budidaya hanya 172,44 ton. Pada sektor perikanan tangkap masyarakat masih menggunakan teknologi yang cukup rendah karena keterbatasan modal, dimana masih ada 2.128 kapal yang tidak menggunakan motor (tradisional).

Ketiga, Kabupaten Nantuna terletak antara 126°24' sampai dengan 127°11' Bujur Timur dan 4°35'00" sampai dengan 6°08'00" Lintang Utara. Negara lain yang berbatasan dengan Nantuna adalah Filipina. Kabupaten Nantuna merupakan kabupaten yang paling padat jika dibandingkan lokasi penelitian lainnya. Berdasarkan BPS (2011), kepadatan penduduk di Nantuna mencapai 57,11 jiwa/km<sup>2</sup>. Berbeda dengan dua lokasi penelitian, pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh desentralisasi wilayah dan adanya kegiatan pertambangan dan perkebunan, di Nantuna pertumbuhan penduduk relatif stabil, misalnya dari 1980-2010. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk lebih dipicu oleh kelahiran, bukan karena imigrasi dari wilayah mainland. Rendahnya imigrasi dari wilayah lain karena di Nantuna belum ada sektor yang memicu pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan penduduk wilayah lain tertarik untuk tinggal di Nantuna. Sektor yang banyak menyerap lapangan kerja baru sebatas sektor jasa, perdagangan, akomodasi, dan transportasi. Berbeda dengan dua lokasi penelitian (Nunukan dan Natuna) yang pertumbuhan ekonominya dipicu oleh sektor pertambangan dan perkebunan sawit. Jika dilihat dari sektor yang digeluti maka tergambar tingkat pendidikan di Nantuna, dimana masih didominasi oleh sektor informal yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Pencari kerja masih ada dominasi pendidikan rendah



Berdasarkan gambar 3 tersebut juga dibuat empat pengelompokan isu diatas dari 19 isu permasalahan yang menjadi penyebab bagi timbulnya masalah lain. Isu permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian besar 7 permasalahan utama yaitu (1) produktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang rendah; (2) lemahnya peran kelembagaan ekonomi; (3) pasokan BBM tidak lancar dan mahal harganya; (4) maraknya *illegal fishing*; (5) ketergantungan perekonomian terhadap negara luar; (6) dukungan penyediaan input produksi berupa benih dan pakan yang kurang dan (7) kurangnya frekuensi angkutan laut. Ketujuh masalah ini paling banyak menyebabkan timbulnya masalah lain. Sedangkan masalah lain yang banyak terjadi akibat permasalahan yang ada adalah permasalahan pendapatan masyarakat yang rendah.

a. Permasalahan Perekonomian di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

- Modal Usaha di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Akses masyarakat di di Nunukan, Natuna, dan Nanusa modal sangat terbatas. Keterbatasan modal tersebut bisa dilihat dalam pemilikan kapal dan karamba. Hal ini menyebabkan armada tangkap yang ada di kawasan-kawasan kecamatan perbatasan laut umumnya didominasi oleh kapal/perahu ukuran kecil, sehingga produksi perikanan tangkap rendah.

- Benih Ikan di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Kegiatan perikanan budidaya di di Nunukan, Natuna, dan Nanusa dihadapkan pada susahnya penyediaan benih, karena faktor jarak yang jauh. Kegiatan perikanan budidaya berkembang di Kecamatan Bunguran Barat (budidaya laut) dan Kecamatan Sebatik (budidaya perairan darat).

- Produksi Perikanan Tangkap Rendah di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Rendahnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh BBM (baik keberlanjutan stok maupun harga yang mahal), ketiadaan rantai dingin (pabrik es dan *cold storage*), minimnya fasilitas listrik, *illegal fishing*, ketiadaan modal usaha, dan minimnya akses transportasi laut (frekuensi perjalanan laut yang rendah dan sewa perahu yang mahal).

- Produksi Perikanan Budidaya Rendah di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Rendahnya produksi perikanan budidaya di Nunukan, Natuna, dan Nanusa disebabkan oleh ketiadaan modal usaha, frekuensi perjalanan laut yang sedikit, susahnya benih ikan dan harga pakan yang mahal.

- Pendapatan Masyarakat Rendah di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Permasalahan rendahnya pendapatan masyarakat yang tinggal di Nunukan, Natuna, dan Nanusa disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat komplek, yaitu seperti produksi perikanan rendah, BBM yang mahal, ketiadaan fasilitas pendukung yang menyebabkan kualitas ikan (pabrik es, *cold storage*) sehingga harga ikan rendah, akses transportasi laut, tidak ada mata pencaharian alternatif, adanya patron-klien, pengolahan pasca panen yang tidak berkembang dan tidak adanya pasar.

- Harga Ikan Rendah di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Rendahnya harga ikan disebabkan oleh tidak adanya sarana pendukung rantai dingin (pabrik es dan *cold storage*) yang mampu menjaga kualitas ikan, tidak ada pasar, dan lembaga koperasi yang tidak aktif.

- *Illegal Fishing* di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Faktor kedekatan jarak wilayah salah satu sebab maraknya *illegal fishing* di Nunukan, Natuna, dan Nanusa, selain itu juga disebabkan oleh lemahnya armada tangkap. Permasalahan *illegal fishing* yang terjadi di Kecamatan Bunguran Barat dilakukan oleh nelayan Vietnam,

di Kecamatan Nunukan dilakukan oleh nelayan Malaysia, dan di Kecamatan Nanusa dilakukan oleh nelayan Filipina.

- Mata Pencaharian Alternatif di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Mata pencaharian alternatif umumnya belum berkembang di Nunukan, Natuna, dan Nanusa. Kalau pun ada, tidak dikelola secara berkelanjutan.

Tabel 1. Pengelompokan isu permasalahan dari hubungan LFA di di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

No.	Isu Permasalahan	Ca (x <sup>2</sup> )	Ef (x <sup>1</sup> )	Grade
1.	Modal Usaha	8	2	I
2.	Benih Ikan	4	0	III
3.	Produksi Perikanan Tangkap Rendah	4	8	I
4.	Produksi Perikanan Budidaya Rendah	4	4	II
5.	Pendapatan Masyarakat Rendah	0	11	I
6.	Harga Ikan Rendah	4	4	II
7.	<i>Illegal Fishing</i>	2	1	III
8.	Mata Pencaharian Alternatif	2	1	III
9.	Armada Tangkap	4	1	II
10.	BBM	8	0	II
11.	Fasilitas Listrik	6	0	II
12.	<i>Cold Storage</i>	6	2	II
13.	Pabrik Es	6	2	II
14.	Akses Transportasi Laut	10	0	I
15.	Pasar	6	1	II
16.	Pakan	4	0	III
17.	Pengolahan Pasca Panen	0	5	II
18.	SDM Koperasi Kurang	2	1	III
19.	Penyuluh/Pendamping	8	0	II
20.	Diversifikasi Layanan Koperasi	0	2	III
21.	Lembaga Koperasi Tidak Aktif	4	2	II

Sumber: Tim Peneliti, 2012.

Keterangan:

Ca = *Causatif* (Penyebab)

Ef = *Effect* (Akibat/Dampak)

- b. Permasalahan Sarana-Prasarana di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

- Armada Tangkap

Usaha perikanan tangkap di di Nunukan, Natuna, dan Nanusa dihadapkan pada

lemahnya armada tangkap. Hal ini dicerminkan dengan dominannya penggunaan perahu berukuran 5 GT ke bawah.

- BBM di Nunukan, Natuna, dan Nanusa  
Bahan bakar minyak (minyak tanah, solar dan bensin) adalah barang mahal di Nunukan, Natuna, dan Nanusa. Hal ini dikarenakan, rendahnya jatah

BBM bersubsidi yang disediakan dan ketiadaan kapal khusus pengangkut BBM.

- Fasilitas Listrik di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Fasilitas listrik di Nunukan, Natuna, dan Nanusa sangat terbatas, karena hanya dari jam 6 pagi hingga jam 12 malam (6 jam).

- Cold Storage di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Ketiadaan pasokan BBM dan listrik menyebabkan *cold storage* tidak dibangun.

- Pabrik Es di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Sama halnya dengan permasalahan cold storage, ketiadaan pabrik es disebabkan oleh ketiadaan pasokan BBM dan listrik.

- Akses Transportasi Laut di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Dalam kondisi cuaca buruk, perjalanan laut tidak bisa dilakukan. Permasalahan transportasi laut terjadi di Kecamatan Nanusa.

- Tidak ada Pasar di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Dengan alasan ketiadaan alternatif transportasi selain laut dan biaya ekonomi tinggi, pembeli yang datang membeli hasil usaha masyarakat di bawah harga pasar. Apabila masyarakat di Nunukan, Natuna, dan Nanusa membawa hasil usahanya ke mainland menyebabkan tingginya modal usaha.

- Pakan di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Budidaya perikanan air tawar berkembang di Kecamatan Sebatik dengan komoditasnya adalah lele dan patin. Pakan dan benih ikan selama ini didapatkan dari Malaysia dengan harga yang sangat mahal dan kurang bagus, sehingga mempengaruhi produksi

perikanan budidaya. Sementara budidaya perikanan laut yang berkembang di Kecamatan Bunguran Barat adalah kerapu.

- c. Permasalahan SDM Masyarakat di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

- Pengolahan Pasca Panen di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Untuk komoditi perikanan di Kecamatan Sebatik hasilnya langsung dijual ke Malaysia. Sementara di Kecamatan Bunguran Barat dan Nanusa, pengolahan pasca panen belum berkembang.

- SDM Koperasi Kurang di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

SDM lembaga koperasi yang rendah disebabkan oleh kurang pendamping atau penyuluh, sehingga pengaruh tidak kreatif dalam mengembangkan layanan koperasi.

- Penyuluh/Pendamping di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Penyuluh atau pendamping di di Nunukan, Natuna, dan Nanusa kurang optimal. Hal ini dikarenakan, kurangnya fasilitas dan minimnya anggaran.

- d. Permasalahan Kelembagaan di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

- Lembaga Koperasi Tidak Aktif di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Lembaga koperasi tidak aktif disebabkan oleh modal usaha dan kurangnya penyuluhan/pendampingan. Akibatnya adalah, berkembangnya patron-klien dan harga ikan yang rendah.

- Diversifikasi Layanan Koperasi di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Lembaga ekonomi yang selama ini beroperasi hanya berfokus pada usaha simpan-pinjam, dan beberapa yang menjual barang-barang sarana produksi dan sembako (sembilan bahan pokok).

## Rumusan Strategi Solusi dari Masalah

Adapun faktor yang menjadi peluang yang dimiliki wilayah perbatasan di Nunukan, Natuna, dan Nanusa adalah potensi pasar dari produk lokal biasanya datang dari negara perbatasan, hal ini disebabkan jaraknya yang dekat dengan negara perbatasan ketimbang dengan wilayah mainland terdekat dengan Indonesia. Namun untuk potensi pasar dari negara tetangga tidak dimiliki oleh wilayah Nanusa. Faktor peluang lainnya adalah kegiatan perikanan didukung oleh pemerintah

daerah, ketersediaan pakan dari ikan rucah melimpah, ketersediaan air tawar, pemerintah mulai peduli dengan pembangunan di pulau-pulau kecil, potensi alam untuk pengembangan wisata bahari, perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dan investor yang berminat untuk usaha budidaya dari negara luar. Namun sebenarnya wilayah yang sangat menarik investor luar untuk kegiatan budidaya perikanan adalah wilayah Natuna, untuk dua daerah lainnya kegiatan budidaya perikanan belum diminati investor luar.

Tabel 2. *External Factor Analysis Summary (EFAS)*

NO.	FAKTOR EKSTERNAL	LOKASI PENELITIAN			Nasional	
	PELUANG (O)	NATUNA	NUNUKAN	NANUSA	BOBOT	SKOR
1.	Potensi pasar dari negara tetangga	x	x		0.08	0.40
2.	Kegiatan perikanan didukung oleh pemerintah daerah	x	x	x	0.09	0.45
3.	Ketersediaan pakan dari ikan rucah melimpah	x	x		0.04	0.16
4.	Ketersediaan air tawar	x	x	x	0.02	0.04
5.	Pemerintah mulai peduli dengan pembangunan di pulau-pulau kecil	x	x	x	0.06	0.30
6.	Potensi alam untuk pengembangan wisata bahari	x	x	x	0.04	0.16
7.	Perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi		x	x	0.03	0.06
8.	Potensi pasar budidaya dari negara luar	x	x		0.05	0.20
9.	Investor yang berminat untuk usaha budidaya dari negara luar	x			0.07	0.35
Subtotal					0.48	2.12
ANCAMAN (T)						
1.	Tidak adanya sarana pasar	x	x	x	0.02	0.02
2.	BBM sangat mahal/pasokan BBM tidak lancar	x		x	0.09	0.45
3.	Akses modal sulit untuk usaha perikanan tangkap	x	x	x	0.04	0.12
4.	Maraknya ilegal fishing	x	x	x	0.03	0.09
5.	Cuaca mempengaruhi aktivitas pulau	x	x	x	0.06	0.24
6.	Suplai energi listrik terbatas			x	0.03	0.06
7.	Penyuluh perikanan kurang memadai	x	x	x	0.03	0.06
8.	Ketergantungan perekonomian terhadap negara luar	x	x		0.08	0.40
9.	Kurangnya Frekuensi angkutan laut	x		x	0.07	0.28

10.	Ketersediaan benih ikan terbatas	x	x	x	0.03	0.06
11.	Produktivitas perikanan tangkap tidak berkembang	x	x	x	0.04	0.12
Subtotal					0.52	1.90
<b>Total</b>					<b>1.00</b>	<b>4.02</b>

Sumber: Tim peneliti, 2012.

Faktor kekuatan yang dimiliki wilayah perbatasan di Nunukan, Natuna, dan Nanusa adalah stok sumberdaya ikan melimpah, belum ada intrusi air laut, adanya kelompok nelayan, budidaya laut sudah berkembang, perairan belum tercemar, ketersediaan tenaga kerja, masyarakat berpartisipasi aktif terhadap program pemerintah, dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tinggi. Pengecualian untuk Nanusa, budidaya laut belum berkembang dan kurangnya tenaga kerja. Sedangkan untuk Nunukan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan rendah.

Adapun kelemahan dari wilayah perbatasan di Nunukan, Natuna, dan Nanusa pada umumnya adalah produksi aktual ikan rendah dibanding potensi ikan, penguasaan teknologi penangkapan sangat rendah, tidak mempunyai kemampuan mengolah ikan, koperasi tidak aktif, tidak ada gudang penampung makanan sembako, tidak adanya *cold storage*, ukuran kapal-kapal kecil, unit usaha koperasi belum berkembang, kapabilitas pengurus koperasi rendah, harga jual ikan di pasar lokal rendah, harga jual ikan di pasar lokal rendah dan sarana

dan prasarana pendidikan tidak memadai. Akan tetapi di Nunukan, tidak ada faktor produksi aktual ikan rendah dibanding potensi ikan, harga ikan di pasar lokal sudah memadai, dan sarana dan prasarana pendidikan sudah memadai. Sama halnya dengan Nunukan, di Nanusa, sarana dan prasarana pendidikan sudah memadai.

### Prioritas Strategi dan Langkah Implementasi

Dari analisis SWOT terpilihlah strategi WO itu, yaitu meliputi: (1) Memberikan bantuan modal untuk peningkatan usaha penangkapan dan budidaya; (2) Peningkatan produktivitas penangkapan dan budidaya; (3) Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam rangka penguasaan teknologi penangkapan, budidaya, dan pengolahan, dan (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi. Strategi terpilih ini selanjutnya diolah menjadi matrik QSPM (*Matriks Quantitative Strategic Planning*). Matrik ini merupakan tahap akhir dari analisis kajian khusus wilayah perbatasan ini dimana membuat formulasi strategi berupa pemilihan alternatif terbaik.

Tabel 3. *Internal Faktor Analysis Summary (IFAS)*

NO.	FAKTOR INTERNAL KEKUATAN (S)	NATUNA	NUNUKAN	NANUSA	Nasional	
					BOBOT	SKORING
1.	Stok Sumberdaya ikan melimpah	x	x	x	0.08	0.40
2.	Belum ada intrusi air laut	x	x	x	0.04	0.16
3.	Adanya kelompok nelayan	x	x	x	0.06	0.30
4.	Budidaya laut sudah berkembang	x	x		0.04	0.12
5.	Perairan belum tercemar	x	x	x	0.05	0.20
6.	Ketersediaan tenaga kerja	x	x		0.02	0.02

7.	Masyarakat berpartisipasi aktif terhadap program pemerintah	x	x	x	0.04	0.16
8.	Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tinggi	x		x	0.03	0.06
Subtotal					0.48	1.42
<b>KELEMAHAN (W)</b>						
1.	Produksi aktual ikan rendah dibanding potensi ikan	x		x	0.04	0.08
2.	Penguasaan teknologi penangkapan sangat rendah	x	x	x	0.11	0.55
3.	Tidak mempunyai kemampuan mengolah ikan	x	x	x	0.08	0.24
4.	Koperasi tidak aktif	x	x	x	0.05	0.15
5.	Tidak ada gudang penampung makanan sembako	x	x	x	0.05	0.20
6.	Tidak adanya coldstorage	x	x	x	0.06	0.18
7.	Ukuran kapal-kapal kecil	x	x	x	0.09	0.36
8.	Unit usaha koperasi belum berkembang	x	x	x	0.05	0.15
9.	Kapabilitas Pengurus koperasi rendah	x	x	x	0.05	0.15
10.	Harga jual ikan di pasar lokal rendah	x		x	0.04	0.08
11.	Sarana dan Prasarana pendidikan tidak memadai	x			0.02	0.02
Subtotal					0.64	2.16
<b>Total</b>					<b>1.00</b>	<b>3.58</b>

Sumber: Tim peneliti, 2012

### (1) Strategi Peningkatan Produktivitas Penangkapan dan Budidaya di Nunukan, Natuna, dan Nanusa

Dari hasil perhitungan nilai TAS (Total Attractiveness Score), maka strategi terpilih pertama adalah Peningkatan produktivitas penangkapan dan budidaya. Strategi ini terpilih karena memiliki nilai TAS yang paling tinggi yaitu sebesar (5,50). Strategi ini berkaitan dengan rendahnya produktifitas perikanan baik dari sisi perikanan tangkap dan budidaya. Rendahnya produktivitas perikanan tangkap mengakibatkan maraknya ilegal fishing di lokasi penelitian. Hal ini disebabkan karena potensi perikanan tidak dimanfaatkan secara optimal dalam peningkatan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan.

Produktifitas perikanan tangkap bisa dilihat dari produksi perikanan tangkap yang hanya 44.884.54 ton di Natuna. Sedangkan jumlah armada penangkapan yang terdiri dari perahu tanpa motor, kapal motor, dan motor tempel, yang masing-masingnya hanya 2.128 unit, 3.668 unit, dan 451 unit. Salah satu hal yang menjadi masalah dalam produktifitas perikanan tangkap adalah ukuran kapal dan mesin yang digunakan oleh nelayan perbatasan yang hanya kurang dari 5 GT. Sedangkan alat tangkap yang digunakan adalah pancing ulur, pancing tonda, bagan, jaring pantai, kelong, rawai, bubu, dan tangkul, yang jumlahnya masing-masing adalah 4.760 unit, 3.059 unit, 87 unit, 244 unit, 153 unit, 126 unit, 5.728 unit, dan 164 unit. Padahal, produksi aktual tersebut lebih rendah dari potensi yang

ada. Hal ini bisa dilihat dari maraknya ilegal fishing di wilayah perbatasan.

Praktik *illegal fishing* ini tentu saja disebabkan oleh lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan dan juga disebabkan oleh jumlah produksi aktual yang lebih rendah dari potensi sebenarnya. Adapun jumlah pelanggaran per tahun *illegal fishing* di masing-masing lokasi penelitian, misalnya di kawasan perairan Natuna selama tahun 2010 adalah 12 kasus, dan di sekitar perairan Nanusa adalah 14 pelanggaran, dan disekitar perairan Nunukan 32 kasus. Berbeda dengan nelayan perbatasan yang hanya memiliki ukuran kapal kecil, nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* lebih besar dari 30 GT, dan menggunakan alat tangkap skala besar seperti pukat dan *purse seine*. Sampai saat ini, pengawasan baru efektif dilakukan baru 100 hari layar dalam setahun dan dengan jumlah kapal pengawas untuk mengawasi wilayah perbatasan Indonesia adalah 24 kapal. Meskipun menurut Direktorat Jenderal PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) diharapkan pengawasan itu dilakukan selama 180 hari.

Rendahnya produktifitas dari sisi perikanan tangkap disebabkan karena ukuran kapal yang kecil, teknologi penangkapan sangat rendah, keterbatasan BBM, akses modal yang rendah, dan faktor sumberdaya manusia. Keterbatasan BBM tidak hanya dari stok, akan tetapi juga dari sisi harga, dimana harga BBM di wilayah perbatasan lebih mahal ketimbang dibanding wilayah mainland. Tingginya harga BBM ini tentu saja mempengaruhi biaya operasional penangkapan. Padahal kontribusi biaya BBM terhadap total biaya adalah antara 35%-40% (PT Perikanan Samudra Besar). Harga BBM per liter di tiga lokasi penelitian antara Rp6.000-Rp7.000. Tingginya harga BBM tersebut karena rendahnya aksesibilitas wilayah perbatasan dari *mainland*.

Selain itu, dari ketiga lokasi penelitian tidak ada satu pun (SPDN), padahal keberadaan SPDN ini tentu menjamin stok BBM juga menjamin harga (spekulasi harga akibat rantai pemasaran yang panjang). Setidaknya pemerintah perlu mengambil kebijakan membangun 1 SPDN tersebut untuk masing-masing lokasi penelitian. Akibat langsung dari pembangunan SPDN ini adalah mengatasi kelangkaan stok dan harga BBM yang tinggi. Sedangkan akibat tidak langsung dari pembangunan SPDN ini adalah tentu saja meningkatkan frekuensi kapal sebagai alat transportasi, akan meningkatkan frekuensi melaut untuk menangkap ikan yang akhirnya dapat meningkatkan produktifitas penangkapan dan pendapatan nelayan. Kebutuhan BBM nelayan natuna misalnya per bulan bisa mencapai 1.667.977 liter per bulan.

Sedangkan dari sisi budidaya, rendahnya produktifitas ini berkaitan dengan ancaman dari bibit yang terkandung dari stok alami. Pengembangan usaha budidaya baru baru berkembang di Nunukan dan Natuna, sedangkan di wilayah Nanusa kegiatan budidaya belum berkembang. Kegiatan budidaya ini dapat meningkatkan perekonomian wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap negara perbatasan baik itu dari segi modal, pasar ekspor, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Adapun implementasi yang disusun adalah mata pencarian alternatif untuk mengurangi ketergantungan ekonomi lokal, misalnya usaha budidaya ini. Sampai saat ini, total produksi budidaya perikanan di Natuna misalnya jauh lebih rendah dengan produksi perikanan tangkap, budidaya hanya mencapai 172.44 ton, dimana luas lahan budidaya adalah 94,73 hektar. Sedangkan produksi perikanan tangkap mencapai 42.120.100 ton, dimana produksi budidaya hanya mencapai 0,4% produksi perikanan tangkap. Dimana produktifitas

perikanan budidaya dipengaruhi oleh jumlah benih, teknologi yang digunakan persediaan pakan, dan kesuburan perairan. Ketiga lokasi penelitian memiliki stok pakan alami yang banyak dan tingkat kesuburan perairan yang tinggi. Namun yang menjadi masalah adalah persediaan benih, dimana selama ini benih hanya ambil dari alam. Berarti kegiatan usaha budidaya berkembang di wilayah perbatasan adalah budidaya pembesaran. Budidaya pendederan dan pembenihan belum berkembang. Berarti keberlanjutan usaha budidaya terancam, karena hanya menguras benih dari alam.

## **(2) Strategi Pemberian Bantuan Modal untuk Peningkatan Usaha Penangkapan dan Budidaya**

Berdasarkan analisis matrik QPSM, prioritas strategi kedua adalah pemberian bantuan modal untuk peningkatan usaha penangkapan dan budidaya. Salah satu kendala dalam usaha peningkatan produktifitas usaha tangkap dan budidaya adalah modal usaha. Pada usaha penangkapan ikan kendala modal ini bisa dilihat dari ukuran kapal yang digunakan nelayan. Saat ini ukuran kapal yang digunakan adalah kurang dari 5 GT di masing-masing lokasi penelitian. Modal tersebut dibutuhkan untuk pembelian kapal yang saat ini hanya membutuhkan Rp 18 juta menjadi Rp 70 juta. Ukuran kapal tentu saja mempengaruhi Peningkatan pembelian mesin dari harga kurang Rp 5 juta menjadi Rp 7 juta. Selain itu, modal juga dibutuhkan untuk pembelian alat tangkap minimal Rp 15 juta jika menggunakan 3 alat tangkap dalam setahun. Modal tentu saja tidak hanya mencakup investasi, tapi juga ada biaya operasional yang meliputi biaya variabel meliputi BBM, es, air bersih, dan bagi hasil dengan ABK. Untuk BBM saja, nelayan membutuhkan biaya operasional sebesar minimal sebesar Rp 30.960.000,- untuk sekali trip melaut (satu hari).

Pembelian kapal yang ukuran kapalnya lebih besar dan mesin yang berteknologi tinggi ini bisa meminimilisir faktor ancaman yaitu aktivitas nelayan di wilayah perbatasan yang sangat tergantung dengan faktor cuaca. Selain itu, tentu saja dengan ukuran kapal yang lebih besar dari 5 GT dan mesin yang berteknologi tinggi tentu saja mempengaruhi jarak wilayah penangkapan. Tetapi pemberian kapal ukuran besar inipun harus juga disertai dengan pelatihan-pelatihan untuk pengoperasian kapal besar tersebut, sehingga kemampuan nelayan dalam mengoperasikan kapal berteknologi tinggi dapat ditingkatkan.

Jika wilayah penangkapan diperluas maka produktifitas akan meningkat, selain itu juga akan meminimilisir illegal fishing, hal ini disebabkan karena potensi sumber daya ikan bisa ditangkap secara optimal. Saat ini dengan perahu nelayan yang ukuran hanya 5 GT di tiga lokasi penelitian maka wilayah penangkapan hanya sejauh 3 mil. Apalagi ada aturan yang membolehkan negara asing bisa menangkap ikan di wilayah ZEE, jika produksi aktual lebih rendah. Jika ada pemberian modal untuk pembelian kapal yang lebih besar dan mesin yang berteknologi tinggi tentu saja produksi aktual akan digenjot, sehingga tidak ada celah hukum untuk nelayan asing untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia.

Sedangkan dari sisi budidaya, rendahnya produktifitas budidaya juga disebabkan oleh kesedian benih, dimana selama ini pembudidaya hanya mengandalkan benih dari alam. Diharapkan pemerintah memberikan bantuan modal kegiatan usaha budidaya. Bantuan modal itu bisa berupa benih yang sudah menjadi kendala dalam usaha kegiatan budidaya di wilayah perbatasan selama ini. Bantuan modal untuk kegiatan benih minimal sebesar 15 juta dalam sekali produksi. Proporsi biaya benih terhadap total biaya adalah sangat

besar mencapai 44 persen. Artinya, sangat penting pemerintah membuat Balai Benih Ikan, karena proporsinya yang cukup besar terhadap total budidaya, selain itu untuk keberlanjutan usaha perikanan budidaya dan usaha perikanan tangkap.

Padahal dari sisi pasar dan modal pengembangan usaha budidaya, di Natuna misalnya ada peluang dari negara perbatasan dan negara Asia lainnya (Malaysia dan Singapura). Untuk meningkatkan produktifitas perikanan budidaya sebesar 30% dibutuhkan bantuan modal per pembudidaya sebesar Rp45 juta dalam sekali produksi. Bantuan modal tidak hanya pada saat pembenihan, akan tetapi juga pada saat pembesaran. Misalnya dengan memberikan bantuan modal kegiatan operasional pembesaran seperti penyediaan pakan. Selain benih, faktor input penting lainnya dalam kegiatan budidaya adalah pakan. Dalam sekali produksi (16 bulan), maka pakan yang dibutuhkan adalah Rp 5 juta, artinya proporsi

biaya pakan terhadap total biaya adalah 15%. Jika kegiatan budidaya ini akan ditingkatkan produktifitas sebesar 30%, maka modal untuk pakannya perlu ditingkatkan sebesar Rp 15 juta per pembudidaya.

Penyediaan modal untuk usahabudidaya dan tangkap bisa dilakukan dengan memanfaatkan kredit mikro untuk nelayan perbatasan. Namun yang menjadi kendala dalam penyediaan kredit mikro ini adalah agunan, dimana masyarakat tidak bisa mengagunkan tanahnya dalam proses pemberian kredit karena tidak bisa diagunkan. Tanah masyarakat tidak bisa diagunkan karena tidak berstatus Hak Guna Bangun (HGB) atau berstatus Hak Milik (SHM). Sedangkan pihak perbankan hanya menerima agunan pada tanah yang berstatus HGB dan SHM. Dari tiga lokasi penelitian, baru satu lokasi (di Natuna), investor berminat terhadap usaha budidaya. Di Natuna, pemodalnya adalah sebagian besar dari orang-orang yang berasal dari Malaysia dan Singapura, sedangkan buyer-nya dari Hongkong.

Tabel 4. Analisis Matrik QSPM untuk Peningkatan Ekonomi Wilayah Perbatasan

No.	FAKTOR KUNCI	STRATEGI			
		1	2	3	4
KEKUATAN (S)					
1.	Stok Sumberdaya ikan melimpah	0.32	0.32	0.24	0.16
2.	Belum ada intrusi air laut	0.04	0.04	0.04	0.04
3.	Adanya kelompok nelayan	0.18	0.12	0.24	0.24
4.	Budidaya laut sudah berkembang	0.16	0.12	0.12	0.08
5.	Perairan belum tercemar	0.1	0.15	0.1	0.05
6.	Ketersediaan tenaga kerja	0.08	0.08	0.06	0.04
7.	Masyarakat berpartisipasi aktif terhadap program pemerintah	0.12	0.08	0.16	0.16
8.	Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tinggi	0.03	0.03	0.06	0.03
KELEMAHAN (W)					
1.	Produktivitas perikanan tangkap dan budidaya rendah	0.16	0.16	0.12	0.08
2.	Penguasaan teknologi penangkapan sangat rendah	0.22	0.44	0.44	0.22
3.	Tidak mempunyai kemampuan mengolah ikan	0.32	0.16	0.32	0.24

4.	Koperasi tidak aktif	0.1	0.10	0.1	0.2
5.	Tidak ada gudang penampung makanan sembako	0.05	0.05	0.05	0.15
6.	Tidak adanya <i>coldstorage</i>	0.18	0.18	0.06	0.12
7.	Ukuran kapal-kapal kecil	0.36	0.36	0.18	0.18
8.	Unit usaha koperasi belum berkembang	0.05	0.10	0.1	0.2
9.	Kapabilitas Pengurus koperasi rendah	0.05	0.10	0.2	0.2
10.	Harga jual ikan di pasar lokal rendah	0.08	0.12	0.04	0.04
11.	Sarana dan Prasarana pendidikan tidak memadai	0.02	0.02	0.08	0.02
<b>PELUANG (O)</b>					
1.	Potensi pasar dari negara tetangga	0.24	0.24	0.16	0.08
2.	Kegiatan perikanan didukung oleh pemerintah daerah	0.36	0.27	0.36	0.36
3.	Ketersediaan pakan dari ikan rucah melimpah	0.12	0.16	0.08	0.08
4.	Ketersediaan air tawar	0.02	0.02	0.02	0.02
5.	Pemerintah mulai peduli dengan pembangunan di pulau-pulau kecil	0.12	0.12	0.24	0.24
6.	Potensi alam untuk pengembangan wisata bahari	0.04	0.04	0.04	0.04
7.	Perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi	0.03	0.03	0.03	0.03
8.	Potensi pasar budidaya dari negara luar	0.15	0.20	0.1	0.15
9.	Investor yang berminat untuk usaha budidaya dari negara luar	0.28	0.28	0.14	0.14
<b>ANCAMAN (T)</b>					
1.	Tidak adanya sarana pasar	0.02	0.02	0.02	0.04
2.	BBM sangat mahal/pasokan BBM tidak sinergy	0.18	0.27	0.18	0.27
3.	Akses modal sulit untuk usaha perikanan tangkap	0.16	0.16	0.08	0.16
4.	Maraknya illegal fishing	0.12	0.12	0.06	0.06
5.	Cuaca mempengaruhi aktivitas pulau	0.18	0.12	0.06	0.06
6.	Suplai energy listrik terbatas	0.03	0.06	0.03	0.06
7.	Penyuluh perikanan kurang memadai	0.06	0.09	0.12	0.12
8.	Ketergantungan perekonomian terhadap negara luar	0.16	0.08	0.32	0.16
9.	Kurangnya Frekuensi angkutan laut	0.07	0.21	0.14	0.14
10.	Ketersediaan benih ikan terbatas	0.09	0.12	0.06	0.09
11.	Produktivitas perikanan tangkap tidak berkembang	0.16	0.16	0.12	0.12
<b>TOTAL</b>		<b>5.21</b>	<b>5.50</b>	<b>5.07</b>	<b>4.87</b>

Sumber: Data diolah, 2012.

### **(3) Strategi Memberikan Pelatihan dan Pendampingan dalam Rangka Penguasaan Teknologi Penangkapan, Budidaya, dan Pengolahan**

Masyarakat wilayah perbatasan terutama nelayan memerlukan pelatihan buat nelayan berupa penguasaan teknologi penangkapan seperti teknologi yang menggunakan GIS. Pelatihan untuk nelayan merupakan persiapan nelayan wilayah perbatasan untuk menerima bantuan Kapal Inka Mina, dimana berdasarkan rencana DJPT pada tahun depan ada wilayah perbatasan yang mendapatkan bantuan kapal Inka Mina. Kapal Inka Mina merupakan kapal yang berukuran besar (diatas 30 GT) menggunakan teknologi tinggi. Padahal masyarakat hanya terbiasa menggunakan teknologi yang sederhana.

Pelatihan buat pengolah dibutuhkan jika hasil tangkapan nelayan berlebihan dan disaat yang bersamaan cuaca buruk sehingga tidak bisa menjual hasil tangkapannya ke negara tetangga. Misalnya menjadikan ikan hasil tangkapan menjadi kerupuk atau ikan olahan, sehingga produknya tidak terbatas pada ikan asin saja. Selain itu pelatihan mengenai pengolahan juga untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Masalah penyedia benih sangat mengharapkan pelatihan dan pendampingan dari pemerintah. Pelatihan dan pendampingan ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pembudidaya dari benih alam, khususnya dalam hal penyediaan dan penciptaan benih. Jika kegiatan budidaya tergantung pada benih dari alam, tentu saja kegiatan budidaya ini tidak dapat diharapkan untuk bersifat berkelanjutan, dalam arti kata kegiatan budidaya akan berhenti seiring dengan keterbatasan jumlah benih dari tahun ke tahun. Pelatihan dan pendampingan yang diharapkan diadakan oleh instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, mencakup aspek

teknis pembenihan, aspek ekonomis, dan aspek kelembagaan.

Untuk tahap awal diharapkan pembenihan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau dibantu oleh Direktorat Jenderal Budidaya, dan kemudian diharapkan bisa disosialisasikan ke masyarakat wilayah perbatasan. Kelangkaan benih ini merupakan suatu ancaman dari usaha budidaya yang baru saja berkembang di wilayah Nunukan dan Nantuna. Padahal usaha budidaya ini bisa dijadikan mata pencarian alternatif masyarakat nelayan. Hal ini dikarenakan, tingginya faktor cuaca yang mempengaruhi aktivitas masyarakat wilayah perbatasan. Jika cuaca buruk, tentu saja masyarakat tidak melaut, hari yang luang ini bisa digunakan nelayan untuk melakukan kegiatan budidaya.

Ancaman ini bisa dikelola dengan meningkatkan penyediaan benih dengan mengharapkan pemerintah merealisasi program penyediaan benih yang pada akhirnya diharapkan usaha benih ikan akan berkembang, tidak hanya usaha pembesaran ikan yang benihnya diambil dari alam. Tentu saja rendahnya produktifitas usaha budidaya tidak hanya berkaitan saja dengan benih, tapi juga dari teknologi yang digunakan, kemampuan sumberdaya manusia. Kegiatan budidaya sebagai alternatif dari mata pencarian sebagai nelayan saat cuaca buruk, telah meningkatkan pendapatan masyarakat wilayah perbatasan di dua wilayah yaitu di Nunukan dan Nanusa. Adapun tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pembudidaya adalah sebesar pendapatan yang diperoleh dalam satu kali panen adalah sebesar Rp 71,6 juta, dimana satu kali panen membutuhkan waktu 16 bulan. Hal ini bisa dijadikan sumber mata pencarian, selain penangkapan ikan. Ironisnya, tidak ada nelayan yang merangkap pembudidaya. Hal ini dikarenakan, nelayan wilayah perbatasan tidak memiliki modal. Nelayan hanya sebagai pemasok benih ikan.

Adapun jumlah pembudidaya di Natuna yang perlu dilatih dan dibimbing adalah 790 pembudidaya. Sedangkan jumlah nelayan yang harus dibimbing dan dilatih adalah 4.304 nelayan di Natuna. Jika 1 KUB (Kelompok Usaha Bersama) memiliki 10 - 20 anggota. Maka dibutuhkan jumlah pendamping dan tenaga penyuluh sebanyak 25 orang. Selain itu, kegiatan pelatihan dan pendamping ini juga harus menyentuh kegiatan pengolahan ikan. Hal ini penting dilakukan supaya ada nilai tambah dari produk perikanan. Selain itu, pengolahan perlu dilakukan juga karena bila cuaca buruk, sehingga masyarakat perbatasan tidak bisa menjual produk mentahnya, bisa mengolahnya sehingga produk ikan mentah itu tidak busuk. Tentu saja kegiatan pelatihan dan pembimbingan bisa mengoptimalkan kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya yang sudah ada. Selain itu juga bisa melibatkan Koperasi Nelayan. Bahkan di beberapa wilayah perbatasan, misalnya benih dan pakan untuk budidaya lele dan patin diperoleh dari Malaysia.

Begitu pun juga dengan kegiatan budidaya lele, untuk penyediaan pakan sangat tergantung dengan negara perbatasan. Jika pemerintah bisa memberikan pelatihan dan pendampingan dalam usaha pembenihan dan pembuatan pakan dengan menggunakan hasil tangkapan yang tidak bisa dijual maka ketergantungan wilayah perbatasan terhadap negara tetangga bisa dikurangi. Ketergantungan aktivitas masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi terhadap negara perbatasan perlu diminimalkan menyangkut kedaulatan negara dan rasa cinta terhadap tanah air.

#### **(4) Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi**

Dari hasil analisis QPSM, maka strategi yang terakhir dilakukan untuk peningkatan ekonomi wilayah perbatasan adalah peningkatan

kapasitas kelembagaan koperasi. Strategi ini merupakan strategi yang paling akhir dilakukan karena dari hasil analisis diperoleh nilai TAS yang paling rendah adalah 4,87. Meskipun begitu, strategi penting dilakukan karena mengingat di tiga lokasi penelitian (Nunukan, Nanusa, dan Natuna), terdapat masalah dalam kelembagaan koperasinya yaitu kapabilitas pengurus koperasi yang rendah, banyak koperasi yang tidak aktif, dan unit usaha koperasi belum berkembang.

Banyak koperasi yang tidak aktif dan unit usaha koperasi belum berkembang karena kekurangan modal. Sedangkan pengurus koperasi yang rendah disebabkan oleh kurangnya jumlah tenaga penyuluh dalam membina kelembagaan koperasi. Unit usaha koperasi belum berkembang, hanya mengandalkan usaha simpan pinjam. Tapi karena kekurangan modal, maka sistem patron klien berkembang. Masyarakat wilayah perbatasan akhirnya terjebak pada sistem patron klien, karena lemahnya kelembagaan koperasi ini. Padahal pengembangan usaha koperasi sangat dibutuhkan masyarakat, terutama sebagai pengumpul dan pemasar produk hasil tangkapan. Selain itu juga dibutuhkan untuk memberikan nilai tambah dari produk perikanan. Koperasi juga ditingkatkan kapasitas kelembagaannya sebagai pusat pelatihan yang tentu saja juga harus melibatkan kelompok nelayan. Jadi usaha koperasi tidak hanya mengandalkan fungsinya dalam simpan pinjam, juga meningkatkan nilai tambah produk dengan mengolah hasil perikanan. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan yang ditujukan kepada manajerial sebuah koperasi. Bagaimana mengelola koperasi dan bagaimana menumbuhkan usaha kecil menengah yang saling berfungsi satu sama lain.

## PENUTUP

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan ekonomi wilayah perbatasan, berdasarkan analisis LFA faktor tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu kelompok faktor perekonomian seperti keterbatasan modal/benih ikan, produktifitas perikanan tangkap/budidaya masih rendah, ilegal fishing dan terbatasnya mata pencarian alternatif, kelompok faktor sarana dan pra sarana seperti masih menggunakan armada tangkap yang ukuran kapalnya kecil (kurang dari 5 GT), belum adanya SPDN/BBI/*cold storage*/pabrik es, kelompok faktor SDM masyarakat yang meliputi rendahnya pengetahuan terhadap pengolahan perikanan dan kurangnya tenaga penyuluh, dan kelompok faktor kelembagaan yang meliputi lembaga koperasi tidak aktif, dan masih rendahnya diversifikasi layanan koperasi. Tujuan kedua dan ketiga dari penelitian adalah rumusan dan prioritas strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kelautan dan perikanan, berdasarkan analisis SWOT dan QPSM maka rumusan prioritas strategi yang dipilih adalah strategi WO yaitu memberikan bantuan modal untuk peningkatan usaha penangkapan dan budidaya, peningkatan produktivitas penangkapan dan budidaya, memberikan pelatihan dan pendampingan dalam rangka penguasaan teknologi penangkapan, budidaya, dan pengolahan, dan Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi. Guna merealisasikan strategi prioritas maka diharapkan pemerintah baik melalui Pemda, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan kementerian/ lembaga lainnya untuk bersinergi membuat rencana aksi bantuan peningkatan modal usaha perikanan, pembangunan SPDN dan BBI, menyediakan 25 tenaga pendamping di setiap

lokasi penelitian, dan merealisasikan 180 hari pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, L. (2008). "Akselerasi Ekonomi Kelautan dan Perikanan menuju Negara Kepulauan yang Maju, Mandiri, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional". Paper Pengantar pada FGD Strategi Pengembangan Ekonomi Negara Kepulauan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2008.
- Akroy, D. (1999). "Logical framework approach to project planning, socio-economic analysis and to monitoring and evaluation services: a smallholder rice project". *Impact Assessment and Project Appraisal* 7(1).
- Ardini, L. (2012). "SWOT Analisis in Strategic Management: A Case Study At Purabaya Bus Station". *Journal of Economic, Business, and Accountancy Ventura* 15(2): 171-186.
- Boateng, W. (2012). "Evaluating the Efficacy of Focus Group Discussion (FGD) in Qualitative Social Research". *International Journal of Business and Social Science* 3(7). April 2013.
- Christope. (2001). *La Diffusion du Tourisme dans L'Archipel Comorien*. MAAP MONDE. Edition 64.
- David, F.R. (2003). *Strategic Management, Concepts and Cases*, 10th ed. New Jersey: Pearson Education Inc.
- David, M.E, And David, F.R. (2009). *The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) Applied To A Retail Computer*

- Store* 8(1): 42-52.
- Dephan. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Departemen Pertahanan (Dephan) RI. Jakarta.
- Hadi, S. (2013). "Program Pembangunan Kawasan Perbatasan". *Buletin Penataan Ruang*. [http://bulletin.penataanruang.net/upload/data\\_artikel/program\\_pembangunan\\_kawasan\\_edisi\\_3](http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/program_pembangunan_kawasan_edisi_3), diakses 30 November 2013.
- Hein, P.L. (1990). "Economic Problems and Prospects of Small Islands". In Beller, W., P. d'Ayala and P. Hein (Eds.). *Sustainable Development and Environmental Management of Small Islands*. Paris, France, New Jersey, USA: The Parthenon Publishing Group.
- Munaf, D, Suseno, T, Janu, R, dan Badar A. (2008). "Peran Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat Daerah Perbatasan". *Jurnal Sositoknologi* 13, April 2008.
- Nejad, M.B., Pouyan, N., and Shojaee, M.R. (2011). "Applying Topsis and Qspm Methods In Framework Swot Model: Case Study of the Iran's Stock Market". *Australian Journal of and Management Research* 1(5): 93-103.
- Onwuegbezie, A., Dickinson, W., Leech, N., and Zoran, N. (2009). "A Qualitative for Collecting and Analyzing Data in Focus Group Research". *International Journal of Qualitative Method* 8(3).
- Prabowo, J.S. (2009). *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional.
- Rangkuti, F. (2005). *Analisis SWOT: Teknik Membelah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Roduner, D., and Schalappi, W. (2008). "Logical Framework Approach and Outcome Mapping". *Rural Development News*. Februari 2008. AGRIDEA International/Publications/Concepts and Approaches.
- Smithson, J. (2000). "Using and Analyzing Focus Group Limitation and Possibilities". *International Journal of Social Research Methodology* 3(2): 103-119.
- Sutaat. (2012). "Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan Antar Negara (Studi Masalah, Kebutuhan, dan Sumberdaya Sosial Desa Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)". *Jurnal Sosiokonsepsia* 17(1): 52-71.
- Tong, J. (2011). "Managing Logistics Higher Education Using Logical Framework Analysis". *International Journal of Innovation, Management and Technology* 2(4). August 2011.
- Utomo, T.W. (2005). "Kondisi Umum Kawasan Perbatasan dan Strategi Alternatif Pengembangan Wilayah Kalimantan Utara". *Jurnal Ilmu Administrasi* 2(3).
- Valentin, E.K. (2005). "Away with SWOT Analysis: Use Defensive/Offensive Evaluation Instead". *The Journal of Applied Business Research* 21(2). April 2005.
- Wismayanti, Y.F. (2012). "Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di Wilayah Perbatasan: Penelitian Aksi di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat". *Jurnal Sosiokonsepsia* 17(1): 1-17.

